

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

PERAN SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN DALAM MENCIPTAKAN KONDISI SOSIAL POLITIK DAN KEAMANAN YANG KONDUSIF PASCA PEMILU 2024 DI KOTA BENGKULU

M.M. Zamroni¹

Yovinus²

Danny Permana³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : zamronijass@gmail.com

Abstrak

Peran Satuan Komando Kewilayah Dalam Menciptakan Kondisi Sosial; Politik Dan Keamanan Yang Kondusif Pasca Pemilu 2024 Guna Mencegah Disintegrasi Bangsa, khususnya pada lokasi penelitian yakni Kodim 0407/ Kota Bengkulu menjadi aspek sentral yang akan diteliti. Berbagai uraian yang telah disampaikan sebelumnya akan menjadi landasan kerangka pikir bagaimana penelitian ini dapat menggambarkan gagasan inovatif dalam membangun kerjasama dengan semua pihak dalam upaya menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Melihat peran Satkowil yang begitu besar, adalah tepat kiranya jika optimalisasi peran Satkowil dalam menciptakan kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif Pacsa Pemilu 2024. Pemilu 2024 dapat dikatakan telah membelah bangsa ini, dimana akibat perbedaan pilihan politik, sesama anak bangsa saling bermusuhan bahkan terlibat dalam berbagai kasus hukum akibat ujaran kebencian, penyebar berita Hoax, kasus makar hingga kerusuhan. Oleh karena itu, peran TNI dan kerjasamanya dengan seluruh komponen bangsa sangat diperlukan saat ini agar tujuan mulia untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang Damai, Adil, Makmur dan bersatu dapat diwujudkan.

Fenomena sosial politik yang kondusif di Kota Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres Tahun 2024, menjadi kajian menarik apakah situasi yang tercipta tersebut murni karena kultur dan karakter sosial masyarakat Kota Bengkulu, atau karena keberhasilan pemerintah daerah dan Satkowil dalam menciptakan situasi tersebut dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena kesesuaian perumusan gejala-gejala, informasi-informasi atau keterangan-

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

keterangan mengenai Peran Satuan Komando Kewilayahan Dalam Menciptakan Kondisi Sosial; Politik Dan Keamanan Yang Kondusif Pasca Pemilu 2024 Guna Mencegah Disintegrasi Bangsa khususnya pada wilayah kerja Kodim 0407/Kota Bengkulu.

TNI sebagai salah satu komponen bangsa, turut berperan serta melaksanakan berbagai upaya melalui Pembinaan Teritorial, dimana Pembinaan Teritorial merupakan amanat dan penjabaran UU RI No 34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI, disebutkan bahwa salah satu tugas TNI khususnya TNI AD dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang) adalah pemberdayaan wilayah pertahanan serta membantu tugas Pemerintah di daerah yang diimplementasikan melalui kegiatan Pembinaan Teritorial. TNI AD melaksanakan Pembinaan Teritorial dalam rangka mengelola potensi Geografi (sumber daya alam dan sumber daya buatan), Demografi (sumber daya manusia) dan Kondisi Sosial.

Tugas TNI dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024. Hal itu dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Tugas TNI selama Pemilu adalah mengadakan perbantuan. Kehadiran TNI membantu Polri sesuai ketentuan yang ada. Tugas TNI dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024 antara lain, pertama, melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik, kedua mengoptimalkan peran Forkompimda, Ketiga memaksimalkan perbantuan pada Polri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Pemilu dan Pilpres di Kota Bengkulu telah terlaksana dengan baik, aman dan dapat terhindar dari konflik yang bersifat destruktif.
2. Seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu telah melaksanakan dengan baik dan maksimal. Hal ini didasarkan pada penilaian dari masyarakat yang menjadi informan penelitian yang mengungkapkan kinerja yang baik dari seluruh unsur penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, Satkowil, Kepolisian dan seluruh unsur masyarakat yang terlibat di dalamnya.
3. Potensi Disintegrasi sosial dan bangsa tidak ditemukan dalam penelitian, hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan berpolitik masyarakat sudah cukup baik.
4. Aparat penyelenggara dan pengamanan Pemilu mengungkapkan bahwa fasilitas perlu untuk ditambah agar ke depan, kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi.

Kata kunci : Satuan Komando Kewilayahan(satkowil), pasca pemilu 2024, Kondisi Sosial; Politik Dan Keamanan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Abstract

The Role of the Regional Command Unit in Creating Conducive Social, Political and Security Conditions Post-2024 Election to Prevent National Disintegration, especially at the research location, namely Kodim 0407/Bengkulu City, is a central aspect that will be studied. The various descriptions that have been presented previously will be the basis for the framework of how this research can describe innovative ideas in building cooperation with all parties in an effort to create a conducive security situation.

Seeing the enormous role of Satkowil, it is appropriate to optimize the role of Satkowil in creating conducive social, political and security conditions Post-2024 Election. The 2024 Election can be said to have divided this nation, where due to differences in political choices, fellow citizens are hostile to each other and even involved in various legal cases due to hate speech, spread of Hoax news, treason cases and riots. Therefore, the role of the TNI and its cooperation with all components of the nation is very much needed at this time so that the noble goal of creating a Peaceful, Just, Prosperous and United Indonesian society can be realized.

The conducive socio-political phenomenon in Bengkulu City during the 2024 General Election and Presidential Election, is an interesting study whether the situation created is purely due to the culture and social character of the Bengkulu City community, or because of the success of the local government and Satkowil in creating this situation in every activity carried out.

The method used in this study is qualitative. The qualitative method is used because of the suitability of the formulation of symptoms, information or statements regarding the Role of the Regional Command Unit in Creating Conducive Social; Political and Security Conditions Post-2024 Election to Prevent National Disintegration, especially in the working area of Kodim 0407/Bengkulu City.

TNI as one of the components of the nation, also plays a role in implementing various efforts through Territorial Development, where Territorial Development is a mandate and elaboration of Law of the Republic of Indonesia No. 34 of 2004 concerning the main duties of the TNI, it is stated that one of the duties of the TNI, especially the TNI AD in OMSP (Military Operations Other Than War) is to empower defense areas and assist the Government's duties in the regions which are implemented through Territorial Development activities. The TNI AD carries out Territorial Development in order to manage the potential of Geography (natural resources and artificial resources), Demography (human resources) and Social Conditions.

The TNI's duties in making the 2024 Simultaneous Election a success. This was explained in the Coordination Meeting (Rakornas) for National Alertness in the Framework of Strengthening the Implementation of the 2024 Simultaneous Election. The TNI's duties during the Election are to provide assistance. The presence of the TNI assists the Police in accordance

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

with existing provisions. The TNI's duties in making the 2024 Simultaneous Election a success include, first, carrying out mapping of conflict-prone areas, second optimizing the role of Forkompimda, third maximizing assistance to the Police.

Based on the results of the research carried out, the following conclusions can be drawn;

- 1. The implementation of the General Election and Presidential Election in Bengkulu City has been carried out well, safely and can avoid destructive conflicts.*
- 2. All elements involved in organizing the Election have carried it out well and optimally. This is based on the assessment of the community who became research informants who revealed the good performance of all elements of the Election organizers, Regional Government, Satkowil, Police and all elements of society involved in it.*
- 3. The potential for social and national disintegration was not found in the research, this shows that the political maturity of the community is quite good.*
- 4. Election organizers and security officers revealed that facilities need to be added so that in the future, the quality of service to the community can be further improved.*

Keywords: *Regional Command Unit (satkowil), post-2024 election, Social Conditions; Politics and Security*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilu memiliki ekses terhadap stabilitas sosial serta bidang-bidang lain di tingkat masyarakat. Berbagai persoalan sosial, hukum hingga potensi konflik yang mewarnai kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) telah membelah rakyat Indonesia akibat perbedaan dukungan politik. Ini merupakan catatan pokok dalam karakteristik demokrasi dan reformasi politik yang telah dibangun pasca Rezim Orde Baru, karena sedikit banyak berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Hal ini mendorong perlunya semua pihak yang berkepentingan dalam upaya menciptakan stabilitas dan kondusifitas untuk tetap menjaga situasi Bangsa termasuk Satkowil.

Peran Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI merupakan salah satu komponen utama dalam perannya sebagai penjaga kondusifitas di masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Teritorial TNI adalah salah satu bagian dari 5 (lima) fungsi organik TNI yaitu fungsi intelijen, fungsi operasi, fungsi personel, fungsi logistik dan fungsi teritorial yang memiliki tugas membina dan mendayagunakan unsur-unsur geografi, demografi dan kondisi

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

sosial menjadi ruang, alat, dan kondisi (RAK) juang yang tangguh dalam pencapaian tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pembinaan Teritorial sebagai salah satu fungsi utama TNI diselenggarakan secara profesional sebagai bagian dari panggilan tugas untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat sangat melekat pada dada setiap prajurit dimana kemanunggalan TNI dengan rakyat merupakan roh maupun jiwanya TNI. Oleh karena itu dalam gelar satuan TNI diwujudkan organisasi yang bertugas membina kemanunggalan TNI dengan Rakyat melalui Satuan Komando kewilayahan (Satkowil) untuk menyiapkan ruang alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara. Penataan tersebut ditempatkan hampir seluruh penjuru tanah air melalui ditingkat pemerintah pusat sampai ketingkat pemerintah desa yang dikenal mulai Kodam, Kodim, Koramil dan Babinsa.

Dalam implementasinya Binter dilaksanakan TNI secara profesional tetap mengedepankan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dengan tetap memegang teguh Jati diri TNI. "Pelaksanaan Binter harus dapat diukur, dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya secara nyata, aktual dan faktual bagi kepentingan aspek kesejahteraan dan pertahanan yang memegang teguh prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara. Yang dimaksud pemberdayaan wilayah adalah membantu pemerintah menyiapkan potensi daerah, membantu pemerintah menyelenggarakan pertahanan dasar kemiliteran dan membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai komponen pendukung pertahanan negara.

Selanjutnya dalam memberdayakan kekuatan pertahanan, TNI harus berperan aktif, sedangkan kekuatan TNI saat ini adalah Satkowil yang tergelar dari tingkat Desa, Kecamatan sampai Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Komandan Satkowil harus bisa mengembangkan peranannya di daerah, terutama dalam membina potensi pertahanan untuk memberdayakan menjadi kekuatan pertahanan, guna mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah,

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa Indonesia.

TNI dan masyarakat memang tidak dapat dipisahkan, karena TNI berasal dari rakyat dan akan selalu bersama-sama dengan rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI. Untuk itu TNI terus menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat, melalui pembinaan teritorial. Binter merupakan salah satu fungsi utama TNI dan merupakan bagian tugas yang harus dilaksanakan untuk menwujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI. Dalam mewujudkan dan memelihara semangat kemanunggalan TNI Rakyat maka diperlukan suatu sikap perilaku TNI yang baik, agar tercipta citra positif di masyarakat. Binter merupakan salah satu fungsi utama TNI dan merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan untuk menwujudkan kemanunggalan TNI Rakyat dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI.

Eksistensi maupun peran TNI Angkatan Darat sebagai pembina teritorial dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang bukan hal yang baru dalam tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai pembina teritorial TNI Angkatan Darat bersama-sama unsur dari TNI dan pemerintah sebenarnya memikul tugas dan tanggungjawab yang sama untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara tujuan pembinaan teritorial yang sinergis bagi kepentingan pertahanan keamanan negara, Satkowil berperan aktif dengan kepentingan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu TNI AD selalu berupaya secara terus menerus meningkatkan kemampuan Binter baik dari segi struktural maupun dari segi operasional agar tetap memiliki kemampuan efektif untuk dapat menjawab tantangan dan menyongsong era globalisasi masa depan yang lebih efektif dan kemampuan sumber daya manusia yang profesional perlu diwujudkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan di dalam perbedaan menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam negara.

Melihat peran Satkowil yang begitu besar, adalah tepat kiranya jika optimalisasi peran Satkowil dalam menciptakan kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif Pemilu 2024. Pemilu 2024 dapat dikatakan telah membelah bangsa ini, dimana akibat perbedaan pilihan politik, sesama anak bangsa saling bermusuhan bahkan terlibat dalam berbagai kasus hukum akibat ujaran kebencian, penyebar berita Hoax, kasus makar hingga kerusuhan. Oleh karena itu,

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

peran TNI dan kerjasamanya dengan seluruh komponen bangsa sangat diperlukan saat ini agar tujuan mulia untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang Damai, Adil, Makmur dan bersatu dapat diwujudkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena kesesuaian perumusan gejala-gejala, informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai Peran Satuan Komando Kewilayahannya Dalam Menciptakan Kondisi Sosial; Politik Dan Keamanan Yang Kondusif Pasca Pemilu 2024 Guna Mencegah Disintegrasi Bangsa khususnya pada wilayah kerja Kodim 0407/Kota Bengkulu.

Adapun definisi dan pengertian penelitian kualitatif menurut Cresswell²⁴ menjelaskan “*A qualitative study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in natural setting*”. Pendapat Cresswell tersebut mengungkapkan bahwa sebuah studi kualitatif diartikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan membangun gambaran holistik kompleks, dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan rinci dari informan. Pendekatan kualitatif dimana instrumen utamanya adalah peneliti sendiri selaku peneliti.

KERANGKA PEMIKIRAN

Melihat adanya potensi kerawanan di masyarakat Pasca penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, perlu kiranya langkah – langkah konstitusi untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah hingga masyarakat. Bagi TNI, peran menciptakan situasi keamanan yang kondusif Pasca penyelenggaraan Pemilu 2024, merupakan implementasi OMSp guna mendukung peran pemerintah daerah dan Polri.

Peran Satuan Komando Kewilayahannya Dalam Menciptakan Kondisi Sosial; Politik Dan Keamanan Yang Kondusif Pasca Pemilu 2024 Guna Mencegah Disintegrasi Bangsa, khususnya pada lokasi penelitian yakni Kodim 0407/ Kota Bengkulu menjadi aspek sentral yang akan

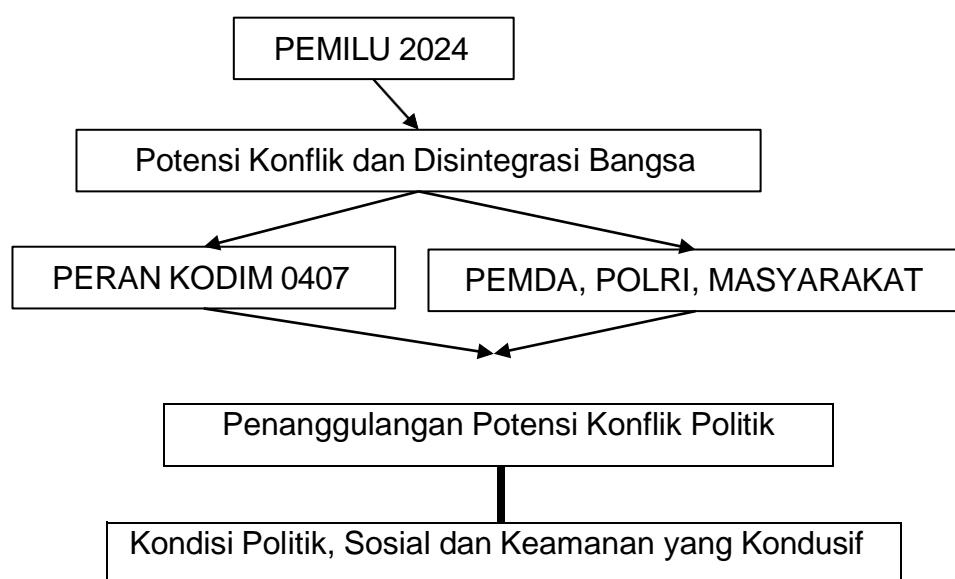
Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

diteliti. Berbagai uraian yang telah disampaikan sebelumnya akan menjadi landasan kerangka pikir bagaimana penelitian ini dapat menggambarkan gagasan inovatif dalam membangun kerjasama dengan semua pihak dalam upaya menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Untuk lebih jelasnya berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar
Kerangka Pemikiran

PEMBAHASAN

Peran Satkowil Dalam Menciptakan Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan yang Kondusif Pasca Pemilu 2024 di Kota Bengkulu

TNI sebagai salah satu komponen bangsa, turut berperan serta melaksanakan berbagai upaya melalui Pembinaan Teritorial, dimana Pembinaan Teritorial merupakan amanat dan penjabaran UU RI No 34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI, disebutkan bahwa salah satu tugas TNI khususnya TNI AD dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang) adalah

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

pemberdayaan wilayah pertahanan serta membantu tugas Pemerintah di daerah yang diimplementasikan melalui kegiatan Pembinaan Teritorial. TNI AD melaksanakan Pembinaan Teritorial dalam rangka mengelola potensi Geografi (sumber daya alam dan sumber daya buatan), Demografi (sumber daya manusia) dan Kondisi Sosial.

Tugas TNI dalam menukseskan Pemilu Serentak 2024. Hal itu dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Tugas TNI selama Pemilu adalah mengadakan pertambuan. Kehadiran TNI membantu Polri sesuai ketentuan yang ada. Tugas TNI dalam menukseskan Pemilu Serentak 2024 antara lain, pertama, melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik, kedua mengoptimalkan peran Forkompimda, Ketiga memaksimalkan pertambuan pada Polri.

Momentum Pilpres yang cukup menyedot energi nasional, mampu diredam oleh seluruh komponen masyarakat di Kota Bengkulu, hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap unsur tokoh masyarakat dan media yang ada di Kota Bengkulu. Berdasarkan data yang diperoleh, disebutkan bahwa secara umum Kota Bengkulu memang kondusif, karena masyarakat setempat tidak menjadikan perbedaan politik sebagai dasar pengkotakan masyarakat. Selain itu, Kota Bengkulu tidak pernah terjadi konflik fisik akibat perbedaan pilihan politik masyarakatnya. Hal ini sesuai juga dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bengkulu, bahwa selama penyelenggaraan Pemilu, persoalan – persoalan yang diadukan oleh masyarakat hanya terkait dengan hal-hal teknis dan tidak sampai hal-hal yang bersifat masif, seperti penggerahan massa dll.

Terkait Netralitas, semua unsur TNI menyatakan netralitasnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya laporan tentang indikasi keterlibatan aparat dalam proses Pemilu dan Pilpres. Hal ini juga disampaikan oleh pihak Bawaslu, bahwa aparat keamanan, baik TNI dan Polri sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan mengayomi seluruh masyarakat, meskipun dalam perbedaan pilihan politik.

Fenomena sosial politik yang kondusif di Kota Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres Tahun 2024, menjadi kajian menarik apakah situasi yang tercipta tersebut murni

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

karena kultur dan karakter sosial masyarakat Kota Bengkulu, atau karena keberhasilan pemerintah daerah dan Satkowil dalam menciptakan situasi tersebut dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Pemerintah daerah dan DPRD berharap agar situasi yang sudah baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Karena pelaksanaan penelitian ini bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketua DPRD Kota Bengkulu mengungkapkan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk menganggarkan kegiatan tersebut secara maksimal agar manfaatnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para narasumber dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada persoalan mencolok dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres, sehingga sebagian besar informan mengapresiasi kinerja Satkowil yang selama ini telah banyak berperan dalam membantu masyarakat di wilayahnya.

Pertemuan – pertemuan yang diselenggarakan oleh Dandim dan Kapolres bersama seluruh unsur tokoh masyarakat dalam rangka menjalin silaturahmi dan kerjasama dalam menciptakan situasi kondusif dalam Pemilu Tahun 2024 cukup intens dilakukan. Kemudian berdasarkan keterangan dari narasumber dari unsur Polri diperoleh data bahwa TNI – Polri menyelenggarakan Posko Keamanan terpadu, di beberapa kawasan strategis di Kota Bengkulu. Kemudian koordinasi juga dilakukan dalam pengamanan TPS, lokasi vital negara, tempat ibadah dan Logistik Pemilu. Disamping berbagai kegiatan tersebut, peran Satkowil juga dirasa sangat baik dalam menciptakan situasi kondusif di masyarakat. Terutama dalam relasi Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Identifikasi Tantangan dan Hambatan

Dasar Hukum Perbantuan TNI berdasarkan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat 2 huruf b angka 10 yang berbunyi “Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.” Selain itu, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Polri dengan TNI No. B/4/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, Pedoman Kerjasama (PKS) antara Polri dengan TNI Nomor B/30/VIII/2015, No.KERMA/23/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, serta Peraturan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Panglima TNI No. 1 tahun 2014.

Terkait hambatan dan tantangan, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana agar setiap institusi negara dapat membangun komunikasi yang baik, atas kesadaran bahwa apa yang dilakukan semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, ego sektoral sedapat mungkin dapat dihindari karena dapat mengurangi efektivitas dan kualitas operasi di lapangan. Meski sejauh ini semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan ada persoalan – persoalan koordinasi dan kewenangan yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Hal – hal lain yang juga turut menjadi persoalan adalah minimnya fasilitas yang dimiliki oleh Kodim dan Polres Kota Bengkulu dalam rangka operasi pengamanan maupun misi lainnya. Dukungan fasilitas dirasa penting untuk menunjang kinerja aparat keamanan agar lebih maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Dari beberapa narasumber yang diwawancara terungkap bahwa kurangnya kendaraan taktis dan operasional akan beresiko terhadap keselamatan aparat jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat.

Hal lain adalah kondisi geografis, dimana beberapa wilayah Kota Bengkulu yang terdiri dari Pulau – pulau yang memerlukan dukungan transportasi laut yang memadai, hal ini karena aparat maupun penyelenggara Pemilu memerlukan sarana transportasi yang memadai agar logistik Pemilu maupun personil dapat terjamin keamanan maupun keselamatannya dalam melakukan operasi pengamanan Pemilu.

Untuk hal – hal lain yang menjadi ekses Pemilu, seperti halnya disintegrasi sosial, dan bangsa memang tidak terasa menonjol seperti halnya yang terjadi di beberapa daerah, namun bukan berarti potensi – potensi tersebut tidak ada. Hal ini terutama kondisifitas di Kota Bengkulu dapat terpengaruh oleh dinamika politik yang cukup keras dari daerah – daerah lain. Hal ini tampak dari keterangan beberapa narasumber yang menyebutkan fenomena HOAX juga melanda wilayah Kota Bengkulu perlu untuk diantisipasi agar tidak berdampak merusak kerukunan masyarakat dan persatuan dan kesatuan bangsa.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

Upaya Pemecahan Masalah

Terkait upaya pemecahan masalah yang perlu untuk menjadi perhatian terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan Kodim perlu untuk memaksimalkan fungsi Babinsa, karena hampir seluruh informan sepakat bahwa penambahan jumlah Babinsa akan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan persoalan – persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masyarakat secara umum mengharapkan agar jumlah Babinsa dapat diperbanyak, karena peran dan fungsi Babinsa yang dinilai baik.
3. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas mamupun kuantitas fasilitas operasional bagi aparat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan maksimal.
4. Cooling Down dan silaturahmi perlu dilakukan sebelum dan setelah proses Pemungutan suara, agar situasi Kamtibmas dapat tetap dipelihara. Karena itu seluruh unsur Forkompimda dan tokoh masyarakat dapat menginisiasi pertemuan – pertemuan tersebut, terutama dengan mengundang para tokoh politik dan partai yang terlibat dalam kontestasi Pemilu dan Pilpres.
5. Indikasi ego sektoral antar pihak – pihak yang berkepentingan perlu untuk menjadi pengamatan serius dari seluruh pihak agar tidak justru menjadi pemicu keretakan sosial dan koordinasi kerja antar aparat yang bertugas di lapangan.
6. Peran Satkowil, Pemda, Kepolisian dan para tokoh masyarakat dan agama, sangat penting dalam menciptakan keamanan dan ketentraman di Masyarakat. Karena itu, himbauan, ajakan, dan ceramah – ceramah yang bersumber dari pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat harus menciptakan kesejukan di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

1. Pelaksanaan Pemilu dan Pilpres di Kota Bengkulu telah terlaksana dengan baik, aman dan dapat terhindar dari konflik yang bersifat destruktif.
2. Seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu telah melaksanakan dengan baik dan maksimal. Hal ini didasarkan pada penilaian dari masyarakat yang menjadi informan penelitian yang mengungkapkan kinerja yang baik dari seluruh unsur penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, Satkowil, Kepolisian dan seluruh unsur masyarakat yang terlibat di dalamnya.
3. Potensi Disintegrasi sosial dan bangsa tidak ditemukan dalam penelitian, hal ini menunjukan bahwa kedewasaan berpolitik masyarakat sudah cukup baik.
4. Aparat penyelenggara dan pengamanan Pemilu mengungkapkan bahwa fasilitas perlu untuk ditambah agar ke depan, kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Aries Djaenuri, 2014. *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: UT.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2017. *Definisi dan Jenis Bencana*, Jakarta: BNPB.

Cockerill, S.K. 1995. Unfolding Systemic Ideas. *Journal Executive Development*, 8. Creswell, John W., 2004. *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*: London: SAGE, 2004.

Gupta, O. & Roos, G. 2001. Mergers and Acquisitions Through an Intellectual Capital Perspective. *Journal of Intellectual Capital*, 2(3).

Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Herry Darwanto, 2015. *Operasi Militer Selain Perang*. Jakarta: Kemenhan.

Krumm, J.M.M., Dewulf, G. & De Jonge, H. 1998. Managing Key Resources and Capabilities: Pinpointing The Added Value Of Corporate Real Estate Management.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Journal Facilities, 16.

Yin, R.K. 1994. *Case Study Research (Design and Methods)*. London: SAGE.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad /96/XI/2009 tanggal 27 Desember 2009

Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Buku Pedoman Penangulangan Bencana Alam di
Darat